PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMINFO TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kominfo (Kominfo) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 selesai disusun.

Tujuan dari LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pertama, indikator indeks SPBE dari target 3,50 terealisir 4,07 (116,28%) atau sangat baik. Kedua, indikator persentase OPD yang mengisi *website* Satu Data, tercapai 100,00% (baik). Ketiga, indikator persentase Desa dan Kelurahan dan kelurahan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam layanan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan dari target 83,43% tercapai 94,35% (113,08%) atau sangat baik.

Berdasakan capaian di atas, maka kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 masuk interval lebih dari 100% (kriteria sangat baik). Capaian kinerja ini dapat menjadi modal untuk peningkatan kinerja instansi di masa mendatang. Untuk melihat kinerja secara rinci dapat dilihat dalam Buku Laporan ini.

Semoga LKjIP Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kebumen, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO, S.Sos, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1. Gambaran Umum Organisasi 6
1.2. Fungsi Strategis 13
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi 13
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
2.1. Perencanaan Strategis 16
2.2. Perjanjian Kinerja 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 24
3.2. Realisasi Anggaran 48
BAB IV 52
PENUTUP 52
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 52
4.2. Permasalahan/Kendala 52
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Daya ASN.....12
Tabel 1.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo.....13
Tabel 1.3 Permasalahan Dinas Kominfo.....14
Table 1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP 2024 15

Tabel 2 1 Rencana Program dan Kegiatan.....19
Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo 21
Tabel 2.3 Target Indikator Sasaran Strategis 2024 22
Tabel 2 4 Indikator dan Target Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2024 23

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 25
Tabel 3. 2 Kinerj Dinas Kominfo Tahun 2024 27
Tabel 3. 3 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya 29
Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 30
Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 32
Tabel 3.6. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……34
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan..... 355
Tabel 3.8 Tabel Kinerja Dinas Kominfo Kab.Kebumen 47
Tabel 3. 9 Data Realisasi Anggaran TA. 2024..... 48
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Tugas, Pokok, dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kominfo, maka Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

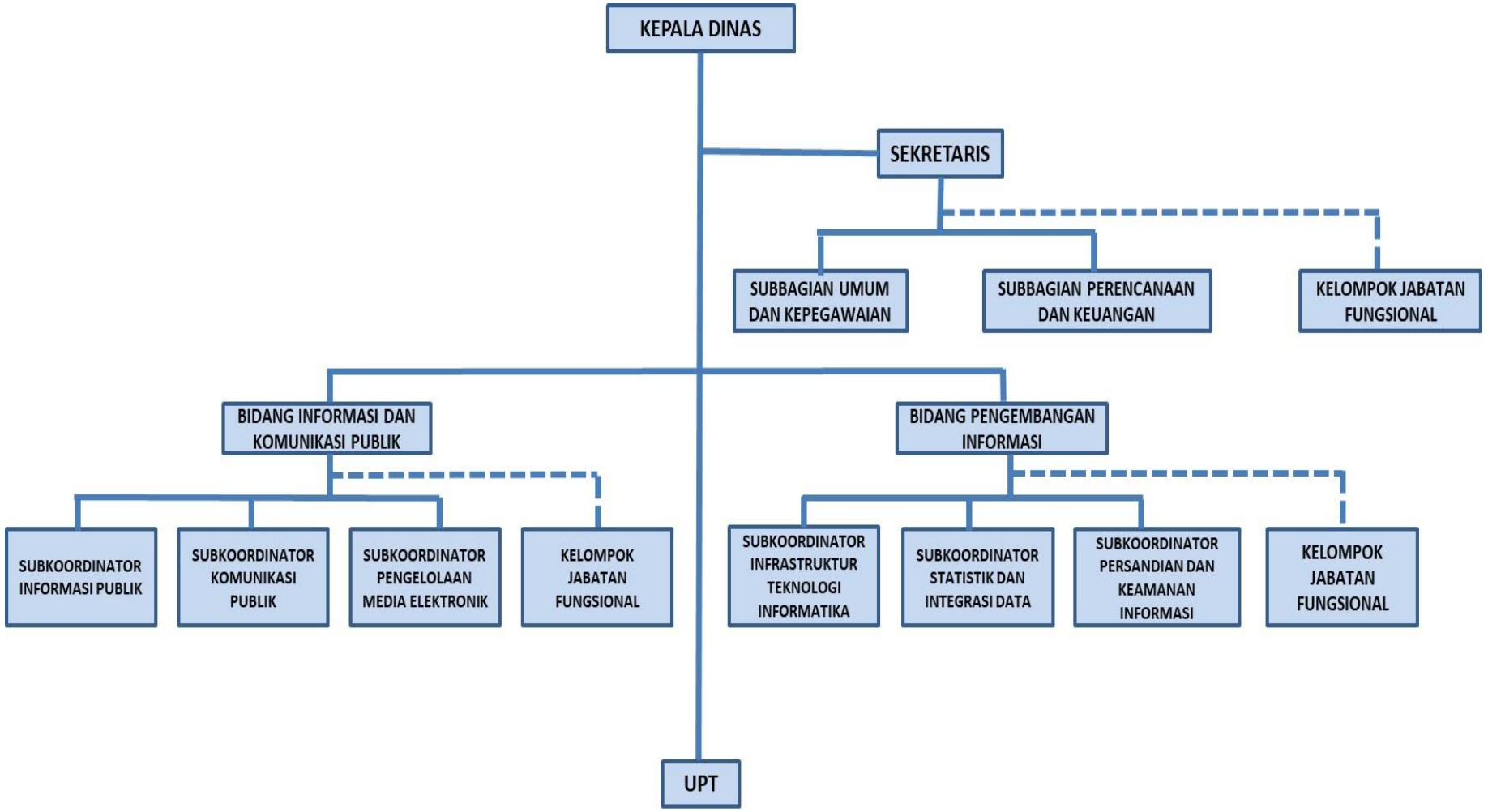
Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
f. pelaksanaan administrasi dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 tahun 2021 terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    - Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
    - Subkoordinator Informasi Publik;
    - Subkoordinator Komunikasi Publik; dan
    - Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik;
d. Bidang Pengembangan Informatika, terdiri atas:
    - Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika;
    - Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data; dan
    - Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi

1.1.3 Uraian Tugas

Masing-masing unsur dari organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi informasi dan komunikasi publik.

Susunan organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dikoordinasikan oleh

Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Subkoordinator terdiri atas:

- Subkoordinator Informasi Publik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi publik.
- Subkoordinator Komunikasi Publik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang komunikasi publik. Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik.
- Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan media elektronik.

c. Bidang Pengembangan Informatika

Bidang Pengembangan Informatika di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan informatika.

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Informatika dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Informatika. Subkoordinator terdiri atas:

- Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika. Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika.

- Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data. Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang statistik dan integrasi data.
- Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi. Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi.

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur. Jumlah pegawai yang bekerja sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Apratur Sipil Negara dan 49 (empat puluh sembilan) Petugas Penunjang Kegiatan (P2K).

Tabel 1.1. Sumber Daya ASN

JABATAN	GOLONGAN					PENDIDIKAN				JML
		II	III	IV	IX	SLTA	D3	D4/S1	S2	
Kepala Dinas				V					V	1
Sekretariat										
• Sekretaris				V					V	1
• Subbagian Umum dan Kepegawaian			V					V		1
• Subbagian Perencanaan dan Keuangan			V					V		1
• Jabatan Fungsional Umum		V	V			V	V			2
Bidang Informasi Publik										
• Kepala Bidang			V					V		1
• Subkoordinator Informasi Publik			V						V	1
• Subkoordinator Komunikasi Publik										
• Subkoordinator Pengelolaan Media Elektronik			V					V		1
• Jabatan Fungsional Tertentu		V	V			V		V		4
Bidang Pengembangan Informatika										
• Kepala Bidang			V					V		1
• Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi			V					V		
• Subkoordinator Statistik dan Integrasi Data										1
• Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi										
• Jabatan Fungsional Tertentu	V	V	V				V	V		7
T o t a l										**22**

1.2. Fungsi Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Tabel 1.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah	• Peningkatan infrastruktur layanan pemerintahan yang mendukung penerapan *e-gov* dan *open-gov* • Penyusunan dokumen proses bisnis yang merupakan dokumen yang mengintegrasikan proses bisnis seluruh sistem elektronik di internal Pemda • Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia
2.	Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik daerah.	• Peningkatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif
3.	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik.	• Peningkatan pelaksanaan manajemen keamanan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan berbasis elektronik dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi • Peningkatan penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Pelayanan Dinas Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan hasil analisis Gambaran Pelayanan PD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Permasalahan Dinas Kominfo

Urusan	Permasalahan
Urusan Komunikasi dan Informatika	1) Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal karena belum ada rujukan dan panduan yang jelas (perencanaan dan pelaksanaan, manajemen kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK); 2) Belum adanya *tools*/alat bantu untuk proses Manajemen Layanan TIK, sehingga layanan TIK yang ada belum dapat termonitor dengan jelas.
Urusan Statistik	Kegiatan Forum Satu Data Kebumen belum optimal;
Urusan Persandian	1) Tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah; 2) Infrastruktur dan teknologi informasi yang kurang memadai di tingkat Desa dan Kelurahan dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik;

1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi AKIP 2024 telah kami tindaklanjuti sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.4

Table 1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah Lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Kami telah melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja. Kesimpulannya tidak ditemukan *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja. *Crosscutting* ditemukan pada kinerja antar subkegiatan. Peralatan yang mendukung kegiatan Podcast Bareng Bupati pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik diadakan di sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2	Memanfaatkan hasil dari pengukuran kinerja untuk pemberian *reward* dan *punishment*	• Kami telah menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu pemberian penghargaan sebagai pegawai teladan kepada pegawai berkinerja baik • pembinaan oleh atasan kepada pegawai (*staff meeting*) seminggu sekali agar kinerja optimal
3	Monitoring atas Rencana Aksi Kinerja secara berkala	Melaksanaan Kegiatan RAKOR POP/K tiap triwulan yang menyajikan capaian rencana aksi kinerja dan capaian IKU yang dilaporkan melalui SIMDALEV
4	Evaluasi atas keberhasilan capaian kinerja	Kami telah memanfaatkan informasi LkjIP sebagai bahan penyesuaian strategi/kebijakan yang berdampak besar dalam mencapai kinerja berikutnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan dengan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka Dinas Kominfo berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2.1.1. Rencana Strategis

Untuk mencapai tujuan suatu perencanaan, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen periode 2021-2026. Terkait penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tersebut, akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2.1.2. Reviu terhadap Visi Misi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan- tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi juga merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Dalam rangka melaksanakan amanat

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Mandiri, dan Berahlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera; yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri; mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal

dicapai dengan meningkatkan jumlah Desa dan Kelurahan wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak; menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai–nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi;
2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dari kelima Misi tersebut maka misi yang terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yaitu misi kesatu, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026 dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabiltas kinerja instansi pemerintah, dan terwujudnya birokrasi yang kapabel yang dimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026.

a) Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kominfo Tahun 2021-2026, maka ditetapkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2 1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program	Kegiatan	Subkegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		4. Pelaksanaan Penatausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kepegawaian Perangkat Daerah	5. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Program	Kegiatan	Subkegiatan
		8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		10. Penyediaan Bahan/Material
		11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		17. Pemeliharaan Mebel
		18. Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya
		19. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		21. Pelayanan Informasi Publik
		22. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain	23. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
		25. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		28. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Renja Dinas Kominfo Kab.Kebumen Tahun 2024

b) Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan urusan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. IKU pada masing-masing urusan pada Dinas Kominfo Kebumen sebagai berikut:

Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo

No	Urusan	IKU
1	Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE
2	Statistik	Persentase OPD yang mengisi *website* satu data sesuai SOP
3	Persandian	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan

c) Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Sasaran Strategis 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	3,50
2	Meningkatnya pengelolaan *website* satu data	Persentase OPD yang mengisi *website* satu data sesuai SOP	100,00%
3	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	83,48%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang berpedoman pada IKU dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Tabel 2 4 Indikator dan Target Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85				85
	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan *website* satu data	Meningkatnya pengelolaan *website* satu data	%	100	100				100
2	Tujuan: Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71	71				71
	Sasaran :								
	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan/kelurahan	%	83,48	83,48				83,48
	Tujuan :								
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,50	3,50				3,50
	Sasaran :								
	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,50	3,50				3,50

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber : PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang

seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Adapun capaian kinerja Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,50	4,07	116,28	Sangat Baik	KepmenPAN-RB nomor 663 Tahun 2024
2	Meningkatnya pengelolaan *website* satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
3	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	%	83,48	94,35	113,02	Sangat Baik	Diskominfo Kab. Kebumen
Kinerja Organisasi (Rata-Rata Nilai)						109,76	Sangat Baik	Data diolah dari standar PermenPANRB No.54 Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 3.2., capaian indikator sasaran Indeks SPBE mendapat predikat sangat baik dengan nilai indeks 4,07 sebagaimana Laporan Hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kebumen dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai Indeks SPBE Tahun 2024 adalah 4,07 dari target 3,50 sehingga capaian kinerjanya 116,28% (sangat baik).

Capaian indikator Persentase OPD yang Mengisi *Website* Satu Data Sesuai SOP diperoleh dari jumlah OPD yang mengisi *website* satu data sesuai SOP dibagi dengan jumlah OPD di Kabupaten Kebumen dikalikan 100%. Pada Juli Tahun 2024, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari 26 Kecamatan dan 24 Badan/Dinas telah mengisi Website Satu Data sesuai SOP di Portal Satu Data Kebumen dari target 50 OPD sehingga capaian kinerjanya 100% (baik).

Capaian indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan diperoleh dari jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan TTE dalam Layanan Administrasi dibagi dengan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kebumen dikalikan 100%. Berdasarkan data pada akhir Desember Tahun 2024, sebanyak 434 desa dan kelurahan dari 449 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Kebumen telah menerapkan TTE dari target 384 desa/kelurahan sehingga capaian kinerjanya 113,02% (sangat baik).

2. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,43	3,44	100,30	3,45	3,70	107,24	3,50	4,07	116,28
2.	Meningkatnya pengelolaan *website* satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	38,91	39,56	101,67	61,30	70,65	115,25	83,48	94,35	113,02

Bila dilihat dari tabel 3.3., capaian indikator kinerja Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan mengalami peningkatan dari 17,39% pada tahun 2021 menjadi 94,35% pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja Indeks SPBE juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai indeks SPBE 3,05 menjadi 4,07 pada tahun 2024.

3. Pengukuran kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	4,07	3,60	116,28
2.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	94,35	100,00	113,02

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3. 4 Perbandingn Capaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Perbandingan rata-rata			
				Nasional	Kementrian	Provinsi	Kabupaten
1.	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	4,07	3,12	4,03	3,42	2,45
2.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	NA	NA	NA	NA
3.	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	94,35	NA	NA	NA	NA

Berdasarkan Tabel 3.4, Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sudah sangat baik bahkan di atas nilai rata-rata nilai indeks SPBE nasional, Kementrian, Provinsi, Kabupaten dan Kota, sedangkan perbandingan capaian indikator Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP dan Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan dengan nilai rata-rata Nasional, Kementrian, Provinsi dan Kabupaten lain tidak ada..

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks SPBE	3,50	4,07	116,28	• Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal karena belum ada rujukan dan panduan yang jelas; • Belum adanya *tools*/alat bantu untuk layanan TIK.	• Menginisiasi penyusunan pedoman formal manajemen formal; • Mengembangkan atau mengadopsi *tools* untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK
2	Meningkatnya pengelolaan *website* satu data	Persentase OPD yang Mengisi *website* Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	Kegiatan Forum Satu Data Kebumen belum optimal	Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tata kelola Satu Data Indonesia
3	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	83,48	94,35	113,02	Kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah	Sosialisasi pentingnya Keamanan Informasi

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen adalah 3,51%. Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\mathrm{E} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi) - \mathrm{RAKi}}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E = efisiensi

PAKi = pagu anggaran keluaran i

RAKi = realisasi anggaran

keluaran i CKi = capaian keluaran

Capaian tingkat efisiensi kinerja diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumus di atas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 3,51%.

Tabel 3.6. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				10.855.338.000	10.474.540.945	96,49	3,51%
	Persentase OPD yang Mengisi *website* Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00				
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel							
	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	94,35	100,00	113,02				
3	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel	4,07	3,60	116,28				
	Meningkatnya Indeks SPBE	4,07	3,60	116,28				

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 3,51% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara -20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi,Dinas Komunikasi Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada Lampiran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Indeks SPBE		Indeks SPBE	116,28%	Menunjang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	10 dokumen	Menunjang
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	Menunjang
		Kegitan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 unit	Menunjang
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Menunjang
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	100%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik	176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan	Menunjang
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	127,98%	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	10 paket	Menunjang
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	100 aplikasi	Menunjang
2	Meningkatnya pengelolaan website satu data		Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100%	Menunjang
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 dokumen	Menunjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3	Meningkatnya layanan administrasi Desa dan Kelurahan yang berbasis teknologi informasi		Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	113,02%	Menunjang
			Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	113,02%	Menunjang
			Jumlah Desa dan Kelurahan dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan dan kelurahan	434 Desa dan Kelurahan	Menunjang

Adapun untuk capaian kegiatan, dari 12 kegiatan terdapat 11 kegiatan yang capaian kinerjanya 100% dan 1 kegiatan yang capaiannya 113,02% yakni Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Target kinerja kegiatan adalah target pada DPA dan DPPA TA 2024. Adapun penjelasan capaian kinerja kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, taget 10 dokumen realisasi 10 dokumen yaitu Renja TA 2025, RKA TA 2024, RKAP TA 2024, DPA TA 2024, DPPA TA 2024,LKJIP TA 2024, LPPD TA 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, dan Dokumen Rakor POP;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, target 12 bulan realisasi 12 bulan;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, target 1 kegiatan realisasi 1 kegiatan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan, meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan bahan material, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target 40 unit realisasi 40 unit yaitu pengadaan *lighting, mic wireless,* batere kamera, *drone,* LED, *headphone*, laptop , *printer* dan *hardisk* untuk pembuatan *podcast*;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, target 12 bulan realisasi 12 bulan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan realisasi 12 bulan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan 21 unit kendaraan roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4, pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan

peralatan dan mesin lainnya, dan rehabilitasi gedung kantor;

8. Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik target 176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik, realisasi 176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan. Kegiatan ini terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan hasil 11.315 jam siar Kebumen TV dan Radio In FM selama 1 tahun; 2) Pelayanan Informasi Publik dengan hasil 176 PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik; dan 3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Kemitraan dan Media Komunitas dengan realisasi 1 kali pertemuan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat 1 kali) dan 3 kali pertemuan FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional);
9. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 10 paket pengadaan, yang terdiri dari pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (utama), pengadaan sewa koneksi internet untuk koneksi IP transit (*redundant*), pengadaan jasa *maintenance tower wireles*, pengadaan jasa *maintenence* data *center*, pengadaan jasa *maintenance link*, Pengadaan jasa *maintenance* tiang *fiber optik*, pengadaan suku cadang peralatan jaringan, dan pengadaan *Personal Computer*;
10. Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memelihara 100 aplikasi aktif pendukung SPBE dari target 100 aplikasi. Terdiri dari 2 subkegiatan yakni 1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik; dan 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan output menyediakan 1 dokumen statistik sektoral. Terdiri dari 1 subkegiatan yakni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
12. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di

Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan output 431 Desa dan Kelurahan dan kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan dan kelurahan. Terdiri dari 2 Subkegiatan yaitu 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyebab keberhasilan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024, yaitu komitmen pimpinan yang tinggi dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen, program yang dilaksanakan antara lain:

1. Statistik/Satu Data

Implementasi Satu Data di Kabupaten Kebumen telah mencapai langkah signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 tahun 2021. Selain itu, juga telah terbentuk Forum Satu Data Kebumen yang diatur melalui Surat Keputusan Bupati. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan data, Kepala Dinas Kominfo juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Inovasi ini melibatkan pembentukan portal resmi satudata.kebumenkab.go.id, yang menjadi sarana utama untuk menampung, mengelola, dan menyebarluaskan data. Portal Satu Data telah dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah (100%) di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut menciptakan landasan hukum, kelembagaan, dan infrastruktur digital yang kokoh untuk mewujudkan integrasi dan pemanfaatan data yang holistik di Kabupaten Kebumen.

- Faktor Pendorong
  - Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021: Adanya Perbup yang mengatur Satu Data Kabupaten Kebumen menjadi pendorong utama untuk implementasi konsep Satu Data. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan Satu Data.

- Forum Satu Data Kebumen: Keberadaan SK Bupati yang membentuk Forum Satu Data memberikan wadah formal bagi kolaborasi dan koordinasi antarstakeholder dalam pengelolaan data.
- Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Penyebarluasan Data: SK Kepala Dinas Kominfo yang mengatur petunjuk teknis memberikan pedoman operasional yang jelas untuk pengelolaan data, meningkatkan efisiensi dan kualitas data.
- Portal Resmi Satu Data: Adanya portal satudata.kebumenkab.go.id menciptakan infrastruktur digital yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data secara terpusat dan terintegrasi.

➢ Hambatan

- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, SDM, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta kegiatan pengelolaan data
- Tingkat Kesadaran dan Keterlibatan Stakeholder: Rendahnya kesadaran dan keterlibatan beberapa stakeholder terkait dapat menghambat kesuksesan program Satu Data.
- Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi dapat menghambat integrasi data secara menyeluruh.

➢ Upaya Untuk Meningkatkan

- Optimalisasi Sumber Daya: Meningkatkan alokasi anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan investasi dalam teknologi guna mendukung infrastruktur data yang lebih kuat.
- Sosialisasi dan Pelibatan Stakeholder: Melakukan program sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Membentuk mekanisme koordinasi yang efektif antarinstansi untuk memastikan keselarasan dan kerjasama dalam pengelolaan data.
- Pemantapan Portal Satu Data: Terus melakukan pemantapan dan

pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik.

2. Tanda Tangan Elektronik Kepala Desa dan Kelurahan

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen telah diimplementasikan sampai kepala Desa dan Kelurahan, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara sebagai PSrE. Manfaat utama dari penggunaan tanda tangan elektronik bagi kepala Desa dan Kelurahan adalah percepatan layanan administrasi Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Desa dan Kelurahan Online Kebumen. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses administratif, tetapi juga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Desa dan Kelurahan dalam mengajukan berbagai permohonan dan mendapatkan pelayanan secara digital. Dengan demikian, implementasi tanda tangan elektronik menjadi langkah progresif untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat Desa dan Kelurahan dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Per Januari 2024 sebanyak 431 Kepala Desa dan Kelurahan dari jumlah total 460 Desa dan Kelurahan/kelurhan di Kabupaten Kebumen telah diterbitkan tanda tangan elektronik dan dapat diimplementasikan untuk mempercepat pelayanan administrasi Desa dan Kelurahan melalui aplikasi Desa dan Kelurahan *online* kebumen. Sebagai monitoring atas penggunaan tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen dapat diakses melalui https://sitektonik.kebumenkab.go.id/.

- Faktor Pendorong

Faktor pendorong paling utama dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Kebumen adalah komitmen yang

tinggi dari Kepala Daerah hal ini dibuktikan dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk menandatangani dokumen elektronik. Selain factor utama tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendorong lain:

- Dukungan Regulasi: Adanya dukungan regulasi yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik, seperti peraturan yang memfasilitasi legalitas dan pengakuan tanda tangan elektronik, memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi.
- Kemajuan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pendorong signifikan untuk mengadopsi tanda tangan elektronik, memungkinkan proses administratif menjadi lebih efisien dan modern.
- Kerjasama dengan Instansi Terkait: Kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara menjadi pendorong penting, karena memperkuat dukungan dan pemahaman teknis yang diperlukan untuk implementasi tanda tangan elektronik.

➢ Hambatan
- Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai di tingkat Desa dan Kelurahan dapat menghambat penggunaan tanda tangan elektronik, memerlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan teknologi.
- Keamanan Data: Keprihatinan terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi dapat menjadi hambatan, khususnya jika masyarakat atau pemerintah Desa dan Kelurahan merasa kurang yakin terhadap keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.

➢ Upaya untuk meningkatkan:
- Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada kepala Desa dan Kelurahan dan masyarakat Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran

terkait manfaat dan prosedur penggunaan tanda tangan elektronik.

- Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan teknologi di tingkat Desa dan Kelurahan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi tanda tangan elektronik.
- Pengembangan Kebijakan Pendukung: Menyusun kebijakan pendukung yang memastikan keamanan dan validitas tanda tangan elektronik, serta memberikan insentif bagi kepala Desa dan Kelurahan yang mengadopsi teknologi ini.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Memperkuat kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber, dan Sandi Negara untuk memberikan dukungan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Kebumen.

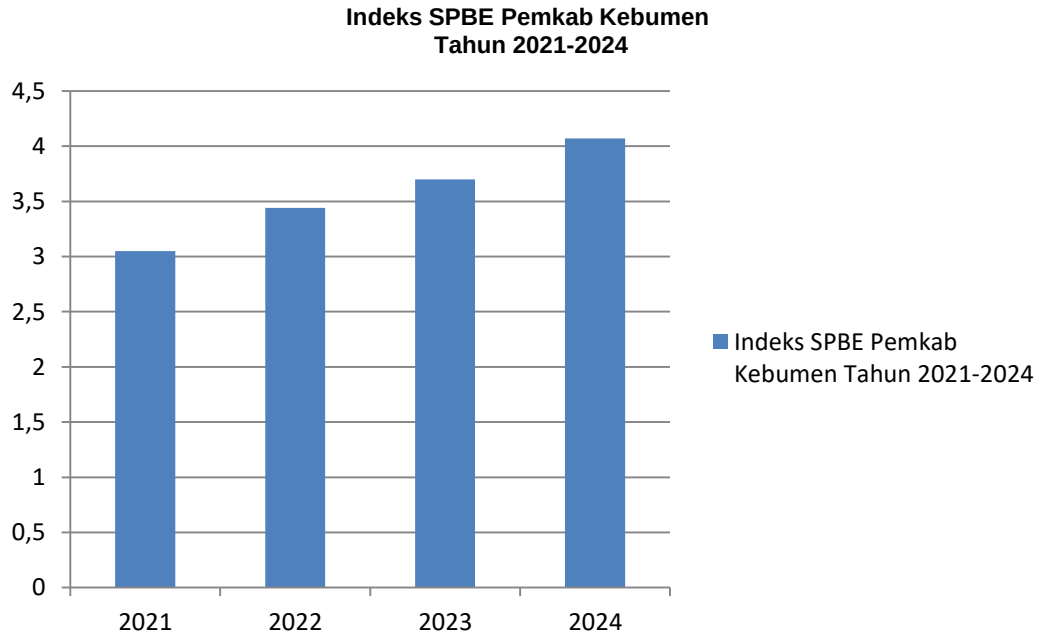
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun tahapan evaluasi tersebut

antara lain Penilaian Mandiri oleh K/L/D/I (Asesor Internal), Peniaian Dokumen, Penilaian Interviu, Penilaian Visitasi, Harmonisasi, Pengumuman Final oleh Asesor Eksternal Kementerian PANRB. Sampai Desember 2024, masih ada ditahap Harmonisasai, sehingga belum ada hasil final (dalam bentuk Keputusan Menpan RB) yang ditetapkan. Sehingga dalam laporan ini menggunakan hasil penilaian dokumen yang dilakukan oleh Asesor Eksternal Kementerian PAN RB.

Indeks SPBE Pemkab Kebumen secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Indeks tahun 2024 (berdasarkan penilaian dokumen oleh Asesor Eksternal Kementerian PAN RB) telah mencapai 4,07 atau predikat Sangat Baik.



- Faktor Pendorong

Beberapa faktor pendorong terhadap implementasi SPBE di Kabupaten Kebumen antara lain:

- Implementasi Kebijakan Internal dan Tata Kelola: Adanya kebijakan internal yang mengatur arsitektur, peta rencana, manajemen keamanan informasi, dan audit teknologi informasi menjadi pendorong utama penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Layanan SPBE yang Terintegrasi: Keunggulan dalam integrasi

layanan administrasi pemerintahan, kepegawaian, dan layanan publik menggunakan aplikasi berbagi pakai serta aplikasi internal menciptakan ekosistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.

- Hambatan

  Beberapa hambatan yang ada antara lain:

  - Kurangnya pedoman formal untuk manajemen SPBE, seperti pedoman kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan;
  - Belum adanya *tool*s/alat bantu untuk proses Manajemen Layanan TIK, sehingga layanan TIK yang ada belum dapat termonitor dengan jelas;
  - Belum tersedianya pedoman formal menyebabkan manajemen SPBE belum berjalan optimal, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan, karena tidak ada rujukan dan panduan yang jelas.

- Upaya untuk meningkatkan:

  - Menginisiasi penyusunan pedoman formal untuk kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, dan manajemen perubahan melalui tim koordinasi SPBE Pemkab Kebumen;
  - Mengadopsi standar nasional atau internasional terkait manajemen SPBE dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal;
  - Mengembangkan atau mengadopsi tools berbasis teknologi untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi layanan TIK;
  - Menyusun rencana aksi implementasi pedoman formal Bersama Tim Koordinasi SPBE sebagai bagian dari dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah;
  - Membentuk mekanisme monitoring berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen SPBE, termasuk penerapan pedoman formal dan penggunaan tools layanan TIK.

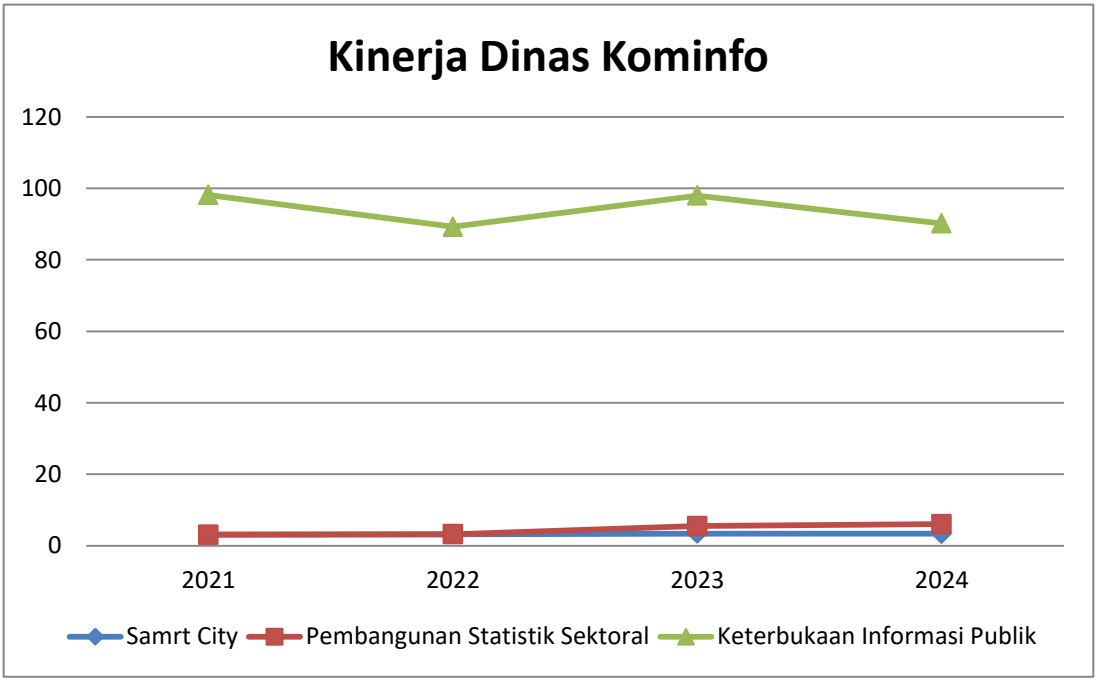
4. Program Lainnya

Selain tiga program utama di atas, Dinas Kominfo Kab. Kebumen juga melaksanakan program Smartcity yang dinilai oleh Kementrian Kominfo, Pembangunan Statistik Sektoral yang dinilai oleh Badan Pusat Statistik, dan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi jawa Tengah. Hasilnya secara umum sudah baik, dengan kemajuan dari tahun 2021- 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel..

Tabel 3. 8 Tabel Kinerja Dinas Kominfo Kab.Kebumen

No	Nama Program	Kinerja Setiap Tahun (Indeks/Nilai/Kategori)			
		2021	2022	2023	2024
1	Smart City	3,05	3,21	3,37	3,34
2	Pembangunan Statistik Sektoral	-	-	2,11 (Cukup)	2,69 (Baik)
3	Keterbukaan Informasi Publik	95,09 (Informatif)	86,00 (Menuju Informatif)	92,46 (Informatif)	84,13 (Menuju Informatif)

Sumber: Data diolah dari beberapa Referensi



Berdasarkan Tabel 3.7, Nilai Program Smart City mengalami kenaikan dari 3,05 (Tahun 2021) menjadi 3,34 (Tahun 2024) begitu pula dengan Nilai

Pembangunan Statistik Sektoral dari 2,11 (Tahun 2023) menjadi 2,69 (Tahun 2024). Sedangkan Nilai dan Kategori Keterbukaan Informasi Publik mengalami penurunan dari 92,46 (Informatif) menjadi 84,13 (Menuju Informatif). Hal ini disebabkan karena ketika dilakukan penilaian, *website* PPID dalam proses *maintenance* (pemeliharaan).

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tahun 2024 merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran melalui APBD Tahun 2024 untuk Dinas Kominfo sebesar Rp10.855.338.000,- dengan realisasi Rp10.474.540.945,- atau serapan 96,49%.

Alokasi anggaran dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3. 9 Data Realisasi Anggaran TA. 2024

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.533.097.000	4.246.770.101	93,68
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	23.698.250	98,74
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.859.113.000	2.671.488.830	93,44
Kegitan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.307.000	156.962.000	80,37
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	80.000.000	79.633.900	99,54

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
Daerah			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.777.000	436.920.000	98,68
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.028.000	516.721.149	91,78
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.872.000	361.345.972	97,96
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.988.963.000	2.963.321.691	99,14
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.988.963.000	2.963.321.691	99,14
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.114.504.000	3.059.992.533	98,25
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.310.798.000	2.261.457.192	97,86
Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	803.706.000	798.535.341	99,36
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	55.680.000	51.013.321	91,62

Nama Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
	(Rp)	(Rp)	(%)
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.680.000	51.013.321	91,62
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	163.094.000	153.443.299	94,08
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	163.094.000	153.443.299	94,08
JUMLAH	**10.855.338.000**	**10.474.540.945**	**96,49**

Berdasarkan tabel 3.8, realisasi keuangan TA 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen sebesar 96,49%. Dari 5 program, program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang persentase penyerapannya paling tinggi yakni 99,14% dan dari 12 kegiatan, penyerapan tertinggi ada pada kegiatan Pengelolaan *e- government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99,36% dan terendah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yakni 80,37% karena adanya jasa iklan dan reklame yang tidak dibelanjakan karena penyelenggaraan reklame di LPPL Radio In Fm dan LPPL Kebumen Televisi bukan merupakan objek daerah retribusi menurut Perda No 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 3. 10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				10.855.338.000	10.474.540.945	96,49	3,51%
	Persentase OPD yang Mengisi *website* Satu Data sesuai SOP	100,00	100,00	100,00				
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel							
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	83,48	93,70	112,31				
3	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel	3,50	4,07	116,28				
	Meningkatnya Indeks SPBE	3,50	4,07	116,28				

BAB IV
PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen selama tahun 2024 dapat dilihat dari capaian IKU. Pertama, indikator indeks SPBE dari target 3,50 terealisir 4,07 (116,28%) atau sangat baik. Kedua, untuk indikator persentase OPD yang mengisi *website* Satu Data, tercapai 100,00% (baik). Ketiga, indikator persentase Desa dan Kelurahan yang menggunakan TTE dalam layanan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan dari target 83,43% tercapai 94,35% (113,08%) atau sangat baik.

Realisasi Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tersebut masuk interval lebih dari 100% (kriteria sangat baik) dengan realisasi anggaran Rp10.474.540.945,00 atau 96,49% dari pagu anggaran Rp10.855.338.000,00.

Selama Tahun 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen meraih penghargaan sebagai juara 1 Kategori Iklan Layanan Masyarakat Radio Terbaik “Dampingi Anak Saat Menonton Televisi” dalam event Anugerah KPID Jawa Tengah Tahun 2024. Penghargaan lain meraih Anugerah Media Center 2024: Kolaborator Terbaik Pengelolaan Konten Audio Visual Kategori Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/Kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen tahun 2024 meliputi:

- Urusan Komunikasi dan Informatika: Pedoman formal untuk manajemen SPBE belum optimal.
- Urusan Statistik: Kegiatan Forum Satu Data Kebumen belum optimal;
- Urusan Persandian: Tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap keamanan data dan kerahasiaan informasi masih rendah.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi peningkatan kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen di masa datang sebagai berikut:

- Urusan Komunikasi dan Informatika: melaksanakan pengembangan manajemen SPBE, terutama yang terkait manajemen perubahan dan manajemen layanan.
- Urusan Statistik: pemantapan dan pengembangan portal Satu Data, termasuk memastikan keamanan data dan penyediaan fitur yang mendukung aksesibilitas dan analisis data yang lebih baik;
- Urusan Persandian: sosialisasi dan edukasi secara intensif untuk meningkatkan pemahaman keamanan informasi;

Demikian LKjIP Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini disusun. Semoga bermanfaat.

Kebumen, 23 januari 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN,

SUKAMTO, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6, Kode Pos 54313 Telp/Fax (0287) 383349
Faksimile (0287) 381423,
Laman kominfo.kebumenkab.go.id Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukamto, S.Sos, M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
Arif Sugiyanto	Sukamto, S.Sos., M.T. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196912241990011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,5				85,5
	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan *website* satu data	Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	%	100			100	
2.	Tujuan: Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74				74
	Sasaran: Meningkatnya layanan administrasi desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa/Kelurahan	%	100				100
3.	Tujuan: Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,6				3,6
	Sasaran: Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,6				3,6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.445.772.000,-	
2.	Program Pengelolan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.2.746.095.000,-	
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.2.836.396.000,-	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.45.000.000,-	
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.106.000.000,-	

Kebumen, 8 Januari 2025

Bupati Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Sukamto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.533.097.000**		**4.533.097.000**	**100**	**100**	**3.884.336.141**	**362.433.960**	**4.246.770.101**	**93,68**	**100**	**6,32**	**0**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24.000.000**		**24.000.000**	**100**	**100**	**20.360.150**	**3.338.100**	**23.698.250**	**98,74**	**100**	**1,26**	**0**
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.400.000	APBD (DAU/PAD/Lain	14.400.000	100	100	12.420.650	1.754.100	14.174.750	98,44	100	1,56	0
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.600.000	APBD (DAU/PAD/Lain	9.600.000	100	100	7.939.500	1.584.000	9.523.500	99,2	100	0,8	0
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.859.113.000**		**2.859.113.000**	**100**	**100**	**2.462.469.369**	**209.019.461**	**2.671.488.830**	**93,44**	**100**	**6,56**	**0**
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.708.355.000	APBD Perubahan	2.708.355.000	100	100	2.356.747.869	191.289.801	2.548.037.670	94,08	100	5,92	0
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.758.000	APBD Perubahan	150.758.000	100	100	105.721.500	17.729.660	123.451.160	81,89	100	18,11	0
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**195.307.000**		**195.307.000**	**100**	**100**	**68.720.500**	**88.241.500**	**156.962.000**	**80,37**	**100**	**19,63**	**0**
2.16.01.2.05.0010	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**195.307.000**	**APBD Perubahan**	**195.307.000**	**100**	**100**	**68.720.500**	**88.241.500**	**156.962.000**	**80,37**	**100**	**19,63**	**0**
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80.000.000**		**80.000.000**	**100**	**100**	**68.720.500**	**10.913.400**	**79.633.900**	**99,54**	**100**	**0,46**	**0**
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	4.000.000	100	100	3.908.000		3.908.000	97,7	100	2,3	0
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	21.000.000	100	100	17.178.500	3.722.400	20.900.900	99,53	100	0,47	0
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	9.000.000	100	100	8.940.500		8.940.500	99,34	100	0,66	0
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	4.000.000	100	100	3.300.000	700.000	4.000.000	100	100	0	0
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	12.000.000	100	100	11.709.500	253.500	11.963.000	99,69	100	0,31	0
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	30.000.000	100	100	23.684.000	6.237.500	29.921.500	99,74	100	0,26	0
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**442.777.000**		**442.777.000**	**100**	**100**	**436.920.000**		**436.920.000**	**98,68**	**100**	**1,32**	**0**
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	442.777.000	APBD Perubahan	442.777.000	100	100	436.920.000		436.920.000	98,68	100	1,32	0
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**563.028.000**		**563.028.000**	**100**	**100**	**470.383.526**	**46.337.623**	**516.721.149**	**91,78**	**100**	**8,22**	**0**
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.625.000	APBD (DAU/PAD/Lain	1.625.000	100	100	1.313.500		1.313.500	80,83	100	19,17	0
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.600.000	APBD (DAU/PAD/Lain	459.600.000	100	100	379.706.826	34.021.623	413.728.449	90,02	100	9,98	0

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.803.000	APBD Perubahan	101.803.000	100	100	89.363.200	12.316.000	101.679.200	99,88	100	0,12	0
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**368.872.000**		**368.872.000**	**100**	**100**	**356.762.096**	**4.583.876**	**361.345.972**	**97,96**	**100**	**2,04**	**0**
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	94.872.000	APBD (DAU/PAD/Lain	94.872.000	100	100	88.644.146	4.583.876	93.228.022	98,27	100	1,73	0
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	3.000.000	100	100	3.000.000		3.000.000	100	100	0	0
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	51.000.000	100	100	50.927.000		50.927.000	99,86	100	0,14	0
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	APBD (DAU/PAD/Lain	220.000.000	100	100	214.190.950		214.190.950	97,36	100	2,64	0
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	**2.988.963.000**		**2.988.963.000**	**100**	**100**	**2.701.890.543**	**261.431.148**	**2.963.321.691**	**99,14**	**100**	**0,86**	**0**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah**	**2.988.963.000**		**2.988.963.000**	**100**	**100**	**2.701.890.543**	**261.431.148**	**2.963.321.691**	**99,14**	**100**	**0,86**	**0**
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.259.563.000	APBD Perubahan	2.259.563.000	100	100	2.040.280.403	198.447.898	2.238.728.301	99,08	100	0,92	0
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	207.346.000	APBD Perubahan	207.346.000	100	100	166.127.631	39.454.250	205.581.881	99,15	100	0,85	0
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	522.054.000	APBD Perubahan	522.054.000	100	100	495.482.509	23.529.000	519.011.509	99,42	100	0,58	0
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**3.114.504.000**		**3.114.504.000**	**100**	**100**	**2.650.499.091**	**409.493.442**	**3.059.992.533**	**98,25**	**100**	**1,75**	**0**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah**	**2.310.798.000**		**2.310.798.000**	**100**	**100**	**1.945.383.187**	**316.074.005**	**2.261.457.192**	**97,86**	**100**	**2,14**	**0**
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.310.798.000	APBD (DAU/PAD/Lain	2.310.798.000	100	100	1.945.383.187	316.074.005	2.261.457.192	97,86	100	2,14	0
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	803.706.000		803.706.000	100	100	705.115.904	93.419.437	798.535.341	99,36	100	0,64	0
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	769.456.000	APBD Perubahan	769.456.000	100	100	672.727.054	91.869.437	764.596.491	99,37	100	0,63	0
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	34.250.000	APBD (DAU/PAD/Lain	34.250.000	100	100	32.388.850	1.550.000	33.938.850	99,09	100	0,91	0
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**55.680.000**		**55.680.000**	**100**	**100**	**46.113.321**	**4.900.000**	**51.013.321**	**91,62**	**100**	**8,38**	**0**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**55.680.000**		**55.680.000**	**100**	**100**	**46.113.321**	**4.900.000**	**51.013.321**	**91,62**	**100**	**8,38**	**0**
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	55.680.000	APBD (DAU/PAD/Lain	55.680.000	100	100	46.113.321	4.900.000	51.013.321	91,62	100	8,38	0
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN**	**163.094.000**		**163.094.000**	**100**	**100**	**142.943.299**	**10.500.000**	**153.443.299**	**94,08**	**100**	**5,92**	**0**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah**	**163.094.000**		**163.094.000**	**100**	**100**	**142.943.299**	**10.500.000**	**153.443.299**	**94,08**	**100**	**5,92**	**0**
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.980.000	APBD Perubahan	17.980.000	100	100	13.683.908		13.683.908	76,11	100	23,89	0

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	145.114.000	APBD Perubahan	145.114.000	100	100	129.259.391	10.500.000	139.759.391	96,31	100	3,69	0
JUMLAH		**10.855.338.000**		**10.855.338.000**	**100**	**100**	**9.425.782.395**	**1.048.758.550**	**10.474.540.945**	**96,49**	**100**	**3,51**	**0**

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=[(6*5)-7]	10=6*5	11=SUM9/SUM10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	10 dokumen	10 dokumen	100	4.533.097.000	4.246.770.101	93,68	449.062.929.899	453.309.700.000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 bulan	12 bulan	100	24.000.000	23.698.250	98,74	2.376.301.750	2.400.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2.859.113.000	2.671.488.830	93,44	283.239.811.170	285.911.300.000	
Kegitan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	195.307.000	156.962.000	80,37	19.373.738.000	19.530.700.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40 unit	40 unit	100	80.000.000	79.633.900	99,54	7.920.366.100	8.000.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	442.777.000	436920000	98,68	43.840.780.000	44.277.700.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100	563.028.000	516721149	91,78	55.786.078.851	56.302.800.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100	368.872.000	361345972	97,96	36.525.854.028	36.887.200.000	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	34,51	3451%	100	2.988.963.000	2963321691	99,14	295.932.978.309	298.896.300.000	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID OPD dan Desa dan Kelurahan dalam kondisi baik	176	176	100	2.988.963.000	2963321691	99,14	295.932.978.309	298.896.300.000	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=[(6*5)-7]	10=6*5	11=SUM9/SUM10
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,86	4,94	127,98	3.114.504.000	3059992533	98,25	395.534.229.387	398.594.221.920	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	10	10	100	2.310.798.000	2261457192	97,86	228.818.342.808	231.079.800.000	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	100	100	100	803.706.000	798535341	99,36	79.572.064.659	80.370.600.000	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	100	100	100	55.680.000	51013321	91,62	5.516.986.679	5.568.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	100	100	100	55.680.000	51013321	91,62	5.516.986.679	5.568.000.000	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	83,48	94,35	113,02	163.094.000	153443299	94,08	18.279.440.581	18.432.883.880	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan administrasi Desa dan Kelurahan	83,48	94,35	113,02	163.094.000	153443299	94,08	18.279.440.581	18.432.883.880	
J U M L A H					**10.855.338.000**	**10.474.540.945**	**96,49**	**1.164.326.564.855**	**1.174.801.105.800**	**3,51%**

Kebumen, 22 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

Sukamto, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda /IV/c